



# **KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI PROVINSI RIAU**

Oleh  
**PROF. H. SUJIANTO, M.SI, P.HD**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar  
dalam Kajian Kebijakan Publik  
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP  
UNIVERSITAS RIAU**

**Pekanbaru, 25 September 2010**

## **Bismillahirrahmanirrahim**

Disusun oleh: **Dr. Ghazali Basri**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, orasi ilmiah yang bertajuk, “Kebijakan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau” dapat saya selesaikan. Penulisan orasi ini memerlukan kerja keras dan mendapat bantuan dan sokongan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Madya Dr. Noriah Mohammed yang bertindak sebagai penyelia. Juga terima kasih kepada bekas pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Dato’ Prof. Dr. Shamsul Amri Baharuddin, kepada pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Prof. Dr. Che Husna bt. Azhari, serta semua kakitangan di Pejabat Am ATMA dan tidak dilupakan kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) serta rakan-rakan seperjuangan, khususnya kepada Dr. Ghazali Basri.

Ucapan yang sama dirakamkan kepada Bapak Rektor Universiti Riau, Dekan Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiti Riau, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Ketua Program Ilmu Administrasi Negera dan Niaga Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiti Riau, Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universiti Riau, rakan-rakan sejawat. Seterusnya Bapak Drs. H. Sulaiman Zakaria, D.pil, M.Si dan Drs. H. Ahmadi, M.Si di Kabupaten Bengkalis; Bapak Ir. Arizal, M.Si dan Ir. Syahfalefi di Kabupaten Pelalawan; Bapak Drs. H. Asrol M. Nor, M.Si dan Drs. Surya Arfan, M.Si di Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian rakan-rakan pembantu di lapangan dalam penyelidikan ini: Harris Gunawan, S.Pi, Arif Budiman, S.Pd, Darwis, S.Sos, Miswanto, SP, serta rakan-rakan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada Prof. Muchtar Ahmad, M.Sc, Prof. Dadang Iskandar, M.Sc, kepada Bapak Drs. H. Amir Hasan, MM, Ak, dan kepada para pegawai staf administrasi baik yang ada di Fakultas maupun yang ada di Rektorat yang telah membantu kelancaran kepengurusan guru besar, sehingga pada hari ini dapat terlenggara pengujuannya. Semuanya itu berkat dukungan kawan-kawan yang mungkin tidak dapat saya tuliskan satu persatu, tetapi yakinlah apa yang kawan-kawan berikan kepada saya akan dihitung pahala oleh Allah SWT. Saya mendo'akan semoga amal baik kawan-kawan akan dibalas surga oleh Yang Maha Pencipta.

Akhirnya diucapkan kepada keluargaku: Emak, Abang, Kakak, Paman, anak kemanakan, saudara-saudara semua, terima kasih atas sokongan dan doanya. Seterusnya untuk isteriku yang tercinta dan dikasihi Dra. Hj. Asmawati, anak-anakku yang dikasihi dan tersayang Alivia Putri Masyitha, Firas Surya Ramadhan, yang telah memberikan sokongan dan semangat untuk kemajuan dan kejayaan keluarga. Mudah-mudahan hasil kerja ini boleh memberikan dorongan untuk kejayaan keluarga di masa hadapan dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mahabbah, dan mawaddah. Semoga Allah SWT memberikan keredhaan dan rahmat-Nya atas segala apa yang telah kita lakukan. Amin.

# KABIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI PROVINSI RIAU

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Reformasi sistem administrasi pemerintahan Indonesia yang diawali tahun 1999 dan ditandai dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah berdampak pada pembentukan daerah otonom yang baru. Sejak tahun 1999 hingga 2009 telah terbentuk 216 (termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti) yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi dari Menteri Dalam Negeri tahun 2008 jumlah kabupaten/kota sudah mencapai 483, kemudian yang sedang diproses untuk mendapat persetujuan dan penetapan 12 kabupaten/kota (Said Sali, 2009; 29)

Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2010 tentang evaluasi pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota yang baru dikemukakan hanya 20 % dari jumlah tersebut yang berhasil. Artinya 80 % kabupaten/kota yang baru tidak berhasil dan dinyatakan gagal dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang baru. Keadaan seperti ini menjadi beban pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran mahupun dalam bentuk pembinaan aparatur daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Prinsip pembentukan daerah otonom adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bentuk nyata dari prinsip dasar pembentukan itu adalah pemberian pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat tanpa ada diskriminasi. Namun kenyataan yang ada pembentukan

daerah otonom lebih banyak menimbulkan masalah-masalah yang baru, baik yang berkaitan dengan hubungan antara daerah dengan pusat maupun hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Contoh terbentuknya Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Pelalawan, menimbulkan masalah tentang perbatasan antara kabupaten induk dengan kabupaten yang baru. Kabupaten Kuansing, Kota Dumai, kemudian diikuti dengan pisahnya Kepulauan Riau membentuk provinsi baru. Kejadian yang terakhir adalah dibentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Kasus terbentuknya Kabupaten Meranti menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Ada sebagian dari anggota masyarakat kurang setuju apabila Meranti pisah dengan Kabupaten Bengkalis dan ada sebagian lagi setuju pisah dan berdiri sendiri. Mereka yang menghendaki lepas dari kabupaten induk karena merasa tidak diperhatikan atau tidak menikmati besarnya anggaran yang diperoleh kabupaten induk. Contohnya dapat dilihat pada daerah atau wilayah Belitung khususnya di Pulau Merbau. Di pulau ini terdapat tujuh desa yang keadaan infrastrukturnya jauh dari apa yang diharapkan. Dibandingkan dengan jumlah APBD Bengkalis yang sangat besar (untuk DAU/DBH tahun 2010 mencapai Rp. 1,5 triliun), rasanya tidak yakin keadaan Pulau Merbau seperti daerah yang tidak bertuan. Begitu juga dengan keadaan daerah atau wilayah di Sungai Apit, sewaktu di bawah administrasi Pemerintahan Bengkalis daerah ini seakan tidak tersentuh tangan pembangunan. Jika ada nampak gerakkan pembangunan, hal itu adalah karena swadaya masyarakat dan bantuan perusahaan yang beroperasi di sana.

Pelaksanaan desentralisasi yang melahirkan daerah otonom mempunyai tujuan untuk pemberdayaan masyarakat

dalam arti yang sebenarnya. Seperti berdaya dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemberdayaan yang dimaksudkan di sini mempunyai tujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat secara hak dan kewajiban, bukan kemandirian dari satu sisi sahaja. Desentralisasi yang melahirkan daerah otonomi membawa pemberdayaan masyarakat untuk mengelola kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang diterima daerah otonom akan memberikan kreativitas untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Artinya pemekaran yang diberikan dapat memberikan keleluasaan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Muara dari pemekaran daerah secara otonom adalah peningkatan kemandirian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan peningkatan kemakmuran yang hakiki yaitu tersedianya semua keperluan masyarakat dalam memenuhi hidupny sehari-hari.

Dasar dari pelaksanaan desentralisasi yang melahirkan daerah otonom adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1999, jo Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut dan tuntutan pemekaran daerah. Oleh pemerintah yang mempunyai reponsivitas yang tinggi, maka tahun 2000 telah dibuat Peraturan Pemerintah No. 129 untuk mengakomodir pemekaran daerah. Sebagai bentuk tanggapan positif PP No. 129 tersebut, diperbaharui dengan PP No. 78 Tahun 2007, iaitu tentang syarat-syarat pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 ini, telah mendorong pertumbuhan dan pembentukan daerah otonom yang baru. Seperti kasus yang ada di Provinsi Riau selama reformasi dari tahun 1999 sampai 2010 telah berdiri daerah baru sebagai berikut;

- Pemekaran Daerah di Provinsi Riau dari lima kabupaten

menjadi dua belas iaitu:

- Kabupaten Kampar menjadi tiga iaitu: 1) Kabupaten Kampar; 2) Kabupaten Rokan Hulu; 3) Kabupaten Pelalawan.
  - Kabupaten Indragiri Hulu menjadi dua iaitu: Kabupaten Indragiri Hulu; Kabupaten Kuantan Singingi.
  - Kabupaten Bengkalis terdiri dari; 1) Kabupaten Bengkalis, 2) Kabupaten Siak, 3) Kabupaten Rokan Hilir; 4) Kota Dumai.
  - Kepulauan Riau menjadi tiga iaitu; Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun.
  - Kabupaten/kota yang tidak dimekarkan adalah Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.
- Pada tahun 2004 kabupaten yang ada di Riau Kepulauan melepaskan diri membentuk provinsi tersendiri yang disebut dengan Provinsi Kepulauan Riau.
- Provinsi Riau yang semula terdiri dari Riau daratan dan perairan/kepulauan, setelah Riau Kepulauan berdiri hanya terdiri dari daerah daratan dan sedikit daerah perairan.
- Kabupaten/kota yang masih di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Riau adalah; Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Siak, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kuansing, dan Kepulauan Meranti.

Melihat perkembangan pembangunan di kabupaten/kota yang baru secara fisik cukup pesat, namun tidak menyebar secara merata di seluruh daerah atau wilayah dan desa yang ada. Untuk itu diperlukan pemekaran daerah yang

secara spesifik agar hakekat dari pemekaran dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat sampai ke pelosok. Pemekaran yang dimaksudkan bukan untuk kepentingan elite tetapi untuk kepentingan warga masyarakat. Oleh itu pemekaran daerah atau wilayah sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan di daerah. Hal ini sesuai dengan sistem kelembagaan daerah atau wilayah yang masuk dalam struktur perangkat daerah.

### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang diiktiraf oleh pemerintah, membuka peluang kepada daerah untuk melakukan perubahan administrasi pemerintahan. Tuntutan otonomi daerah pada dasarnya sikap kritis dari kalangan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat selama ini merasa tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan. Tuntutan hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang wajar, jika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atau negara. Bentuk tuntutan yang nyata kepada pemerintah adalah agar mereka diberikan pelayanan yang berkualitas, aksestabel, transparan, akuntabel dan ekuitabel. Tuntutan-tuntutan seperti itulah yang senantiasa disampaikan agar pemerintah mampu menyikapi dan mewujudkannya, karena masyarakat telah memberikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran berbagai iuran atau pajak.

Secara empiris, kondisi administrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sungguh memprihatinkan. Kondisi ini disebabkan oleh sistem birokrasi dan organisasi yang hirarkis, birokratis, terikat oleh *political authority*, dan kurangnya inovasi dan kreativitas terasa lambat. Keluhan

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan *output* dari kegiatan pemerintah makin lama justru makin banyak, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan tanggapan positif terhadap tuntutan dan harapan masyarakat tersebut dapat menyebabkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Otonomi daerah memiliki peluang dan tantangan. Dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Secara politis, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan kesempatan guna mengembangkan potensi kebhinekaan atau keragaman daerah, sehingga dapat dikembangkan seoptimal mungkin potensi khas yang selaras dengan sistem nilai dan budaya daerah. Kemudian secara administrasi atau manajemen, otonomi daerah dapat diharapkan dikembangkannya organisasi-organisasi sebagai alat dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat di daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya tuntutan dan kompleksitas pekerjaan yang semakin berkembang sehubungan dengan semakin kompleknya dan bertambahnya baik secara kuantitas maupun kualitas kebutuhan masyarakat. Peranan pemerintah sekarang adalah untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (*community-empowered*). Di sini fungsi pemerintah lebih menjadi pengarah (*steering rather than rowing*), apalagi masyarakat dewasa ini merupakan masyarakat yang kritis. Sudah barang tentu merupakan tantangan dan tuntutan layanan publik yang tidak biasa. Dalam

arti layanan yang disediakan sudah barang tentu tidak sederhana masa lalu. Kompleksitas yang dihadapi hari ini telah memaksa para aparat pemerintah dan organisasinya harus menjadi proaktif, kreatif sekaligus inovatif.

Pembentukan daerah otonom yang baru di Provinsi Riau secara nyata memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sisi penerimaan dana dari pemerintah pusat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari pembangunan fisik seperti infrastruktur setiap daerah semakin bertambah. Namun pembangunan infrastruktur dan bangunan fisik masih berfokus di pusat-pusat pemerintahan. Pertanyaannya bagaimana pembangunan infrastruktur di desa-desa atau di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan? Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan sudah sesuai dengan visi dan misi pemekaran yang dilakukan? Pertanyaan ini menggelitik hati setiap kita, karena hampir sebelas tahun reformasi dan pemekaran di daerah ini berlangsung tetapi keluhan dan kemiskinan di daerah ini masih ada saja, sementara dana dana bagi hasil yang diterima daerah pemekaran cukup tinggi.

### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Konsep organisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok dua orang atau lebih (*social entity*) yang dengan sadar bekerjasama secara terpadu (*consciously coordinated*) dalam suatu konteks tertentu, menurut batas-batas (*boundaries*) dan fungsi-fungsi tertentu, guna mencapai suatu tujuan bersama atau perangkat (*set off*) tujuan-tujuan bersama tertentu. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari organisasi.

Kehidupan masyarakat modern dewasa ini ditandai dengan upaya lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Peradaban modern sangat dipengaruhi oleh kehidupan organisasi yang mengutamakan bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien. Melalui cara mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia, organisasi mampu menciptakan suatu alat sosial yang ampuh dan dapat diandalkan. Melalui organisasi tersebut sumber daya manusia yang dimilikinya dan sumber daya lainnya seperti sumber daya keuangan, sumber daya perlengkapan, mesin, metode kepemimpinan dan tenaga ahli dipadukan secara harmonis menjadi satu. Kemudian pada saat yang sama organisasi secara terus menerus melakukan pengkajian atau evaluasi sejauh mana ia telah berfungsi secara efektif dan efisien serta selalu berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan yang terjadi, agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Oleh karena itu, organisasi senantiasa dituntut untuk dapat melayani dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat atau warganya secara efektif dan efisien.

Manusia modern sering disebut sebagai manusia organisasional (Siagian, 2001: 19). Manusia organisasional menjadi fokus analisis pendekatan administratif. Artinya terdapat hubungan ketergantungan antara manusia dengan organisasi. Artinya manusia tidak lagi mungkin mencapai berbagai tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasional. Sebaliknya setiap organisasi akan mencapai tujuan dan sasaran melalui usaha kooperatif sekelompok orang di dalamnya. Salah satu implikasi hubungan ketergantungan tersebut, baik untuk masa sekarang maupun di masa depan, adalah apakah umat manusia meraih kemajuan yang lebih besar atau tidak akan sangat tergantung pada kemampuan manusia untuk menciptakan

organisasi dengan lebih baik dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan lebih efisien, efektif dan produktif.

Paradigma pelayanan telah berubah, bukan lagi berorientasi pada produk tetapi berorientasi pada konsumen, lebih tepatnya berorientasi kepada kepentingan pasar. Hal ini didasarkan pandangan: *Pertama*, para pengguna jasa sektor publik (pelanggan) secara langsung atau tidak langsung telah mengeluarkan uangnya untuk jasa yang diterimanya atau dibutuhkan, sehingga wajar apabila masyarakat/warga menuntut adanya kepuasan dalam pelayanan publik. *Kedua*, aparaturnegara sebagai *public servant* yang telah menerima gaji atas tugasnya dalam memberikan jasa pelayanan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mencari cara-cara yang lebih baik dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pelanggan.

Birokrasi cenderung untuk tumbuh dan menjadi kekuatan raksasa yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingannya itu sendiri. Hal ini disebabkan birokrasi: Mengelola urusan hajat hidup orang banyak; Bersifat monopolistik; Organisasinya bersifat raksasa; Anggaran yang dipergunakan berukuran raksasa; Sangat rentan terhadap institusi politik; Secara generik ukuran keberhasilan kinerja birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru; Tidak pernah menyadari ada perubahan besar di dunia; dan Birokrasi sangatlah *commanding* dan *centralistic*.

### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Proses demokratisasi di negara ini ditandai oleh adanya desentralisasi pemerintahan, yaitu dalam bentuk pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bentuknya dari pelimpahan wewenang itu adalah daerah dapat mengatur diri sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti beban kerja daerah bertambah dan daerah dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmurnya. Berdasarkan filosofi tersebut, maka pembentukan daerah otonom baru membawa visi dan misi untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh itu, tuntutan masyarakat untuk pemekaran atau pemisahan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah adalah;

- Perlu adanya pembagian kekuasaan dan desentralisasi kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada element tertentu. Selain itu juga untuk meringankan beban tugas dan kegiatan pemilik kekuasaan.
- Pembentukan negara atau pembentukan daerah baru bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat. Tentu tuntutan pemekaran atau pemisahan administrasi sesuai dengan tujuan pembentukan negara atau pembentukan daerah baru. Minimal pemerintah dapat memberikan pelayanan yang diperlukan oleh warga masyarakat.
- Sesuai dengan ideologi negara, iaitu pembentukan negara yang demokratis. Pemekaran daerah bertujuan untuk menghidupkan demokrasi, tentunya ini mengakui bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat. Oleh itu, diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Jawaban dari tuntutan adalah perlu pendistribusian kekuasaan ke unit yang lebih rendah atau kecil.



- Pemekaran wilayah adalah suatu bentuk untuk menghidupkan keanekaragaman. Artinya dengan pemekaran wilayah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan sesuai dengan keadaan sosial, budaya, ekonomi dan politik di daerah masing-masing.

Jadi, ide otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 2008 adalah suatu bentuk untuk menghidupkan demokratisasi dalam kehidupan berpolitik. Konsekwensi dari tuntutan itu adalah daerah harus mampu untuk mengurus rumah tangga sendiri. Untuk ini diperlukan pembagian wilayah dalam bentuk unit-unit yang lebih kecil lagi iaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, Daerah atau wilayah dan desa/kelurahan. Ada beberapa aspek dalam tuntutan pemekaran, iaitu;

### **1. Aspek Sifat Kondisi Daerah**

Ada dua macam sifat yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan/pemekaran, iaitu:

- Hal yang berkaitan dengan nilai dan norma daerah.
- Berkaitam dengan potensi dan kebutuhan daerah atau masyarakat.

### **2. Aspek Kewenangan**

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.

### **3. Aspek Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia, baik di dalam organisasi maupun

proses manajemen, keberadaannya sangat dibutuhkan.

#### **4. Aspek Keuangan**

Untuk pemekaran aspek vital yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan keuangan untuk membiayai organisasi yang dibentuk.

#### **5. Aspek Teknologi**

Untuk percepatan pelayanan pemerintah memerlukan *electronic government (E-Government)*. Keuntungan penerapan E-G, yaitu memberikan nilai tambah dalam melakukan pelayanan publik (cepat, akurat dan terpadu).

#### **6. Aspek Keperluan Masyarakat**

Masing-masing daerah disadari memiliki perbedaan potensi yang dimilikinya. Pemerintah telah memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun atau membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **8. Aspek Nilai Strategis**

Nilai strategis biasanya tertuang dalam visi dan misi daerah.

#### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Pemekaran wilayah pada suatu daerah bukan barang baru bagi Indonesia. Persoalan pemekaran sudah terjadi



sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari zaman kerajaan seperti terbentuknya wilayah kerajaan pusat dan wilayah kerajaan taklukan pada masa pemerintahan Sriwijaya, Majapahit dan sampai pada zaman penjajahan Belanda. Pemekaran wilayah yang dilakukan pada waktu penjajahan bertujuan untuk kepentingan pemerintah penjajah dalam rangka memperkuat cengkraman dalam penaklukan daerah jajahan.

Gagasan untuk melakukan pemekaran sejalan dengan gagasan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari gagasan pemekaran dan desentralisasi adalah untuk membagi pekerjaan dan tanggung jawab. Dalam konteks ini pemekaran dan desentralisasi sangat mulia sekali jika dilihat dari pelbagai sudut pandang.

Tuntutan pemekaran daerah dan desentralisasi pemerintahan daerah adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 khas pasal 18 yang memberikan keistimewaan daerah dan perbedaan setiap daerah dari pelbagai bentuk. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami gelombang pasang surut. Pada masa pemerintahan penjajah Belanda desentralisasi mengalami pasang naik. Kemudian pada masa penjajahan Pemerintahan Militer Jepang pelaksanaan pemerintahan terpusat dalam satu kekuatan, maka tidak mungkin pemerintah pusat akan memberikan kewenangan kepada daerah jajahan. Akibatnya desentralisasi mengalami masa surut sampai tohor (kering). Sejak saat ini, sistem kekuasaan pemerintah menjadi tersentralisasi kembali. Memasuki zaman awal kemerdekaan dan sampai pada akhir pemerintahan Orde Baru, desentralisasi menjadi sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan di muka umum. Pada masa pemerintahan Orde

Lama, pemerintah pusat akan menjalankan Bhinika sesuai dengan UUD, maka pemerintah pusat memberikan desentralisasi kepada daerah, tetapi memunculkan separatisme dan kemudian itu ditarik kembali ke pusat. Pada masa pemerintahan Orde Baru desentralisasi sempat diperbincangan dalam bentuk kebijakan pemerintah, yaitu dengan diiktirafkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Desentralisasi yang ada dalam UU tersebut tidak banyak dilakukan, pemerintah pusat lebih melaksanakan dua asas yang sesuai dengan kepentingan pusat, yaitu asas dekonstruksi dan perbantuan.

Bubarnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 merupakan titik awal dari perubahan administrasi pemerintah. Perubahan ini bukan saja merubah pondasi pemerintahan yang sentralitis, tetapi juga merubah pondasi dan sekaligus merubah tatanan sosial ekonomi masyarakat, yaitu memberikan kekuatan hak sipil untuk bangkit dari keterpurukan pelbagai aspek. Namun kebangkitan yang dilakukan belum ada ukuran yang tepat, karena jauh dari nilai masyarakat di negeri ini. Dengan kata lain, makna kebhinekaan di dalam kekuasaan pemerintahan lebih menonjol dan lebih dikehendaki dibandingkan makna ketunggal-Ikaan. Otonomi daerah yang sebagai implikasi dari hasil pemekaran dan desentralisasi telah menonjolkan ego daerah yang sekaligus ego masyarakat yang ingin menerapkan kebhinekaan yang bukan menuju ke-Eka-an.

Awal reformasi yang melahirkan demokrasi menimbulkan banyak implikasi. Demokrasi yang ada sekarang ini bukan demokrasi yang sejati, karena demokrasi yang sekarang ini lebih mengarah kepada kebebasan yang tidak terkendali. Selain itu juga demokrasi hari ini menimbulkan rasa iri di kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan porsi jabatan

dan kedudukan di negeri ini. Pemekaran yang terjadi lebih disebabkan oleh munculnya rasa iri politik yang tidak mempunyai kesempatan untuk jabatan yang diinginkan. Masyarakat diprovokasi untuk mandiri dan membentuk negeri sendiri, bahkan yang sangat memilukan muncul sifat mengunci diri, orang lain tidak boleh masuk dalam jajaran jabatan yang diinginkan. Pemilihan pimpinan lembaga mesti orangnya sendiri, tidak boleh orang lain mengikuti. Demokrasi yang dibentuk sesuai dengan keinginan sendiri, alat pengumpul suara melalui membagi-bagi kursi, dari kelompok sendiri, menggunakan *money*, inilah implikasi pemekaran negeri.

Fenomena di atas telah menimbulkan kecurigaan, karena itu pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yang secara substansi memberikan kekuasaan yang luas pada pemerintah daerah, segera direvisi dengan membentuk UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian direvisi lagi dengan UU No. 12 Tahun 2008. Revisi UU ini dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembalikan arah secara jelas akan kedudukan dan fungsi pemerintah daerah. Hal ini tidak dilihat dari keunggulan atau kemampuan sosial, politik, dan ekonomi untuk secara teknis dapat dikatakan sebagai “yang mampu dan dapat untuk dimekarkan”. Kemampuan dari secara ekonomi, politik, sosial tidak lagi menjadi ukuran mutlak untuk suatu daerah dimekarkan atau tidak dimekarkan. Pemerintah telah memandang secara objek terhadap minat dan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran. Pandangan ini berdasarkan pada makna dan manfaat dari pemekaran yang dilakukan. Manfaat itu bukan saja dari sisi politik atau ekonomi, tetapi melihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Oleh itu, mari kita membuka mata, hati, dan akal terhadap pemekaran yang dilakukan. Tujuannya bukan pada pembagian hasil atau memenuhi ambisi segelintir orang, tetapi untuk kesejah-

teraan dan kemakmuran penghuni negeri melalui pelayanan yang sejati.

Pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan bukan sekedar pembagian kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan yang beriringan dengan kewenangan untuk melakukan pemerintahan sendiri. Dalam figura peningkatan pelayanan dan menuju kesejahteraan rakyat semata. Bukan karena jabatan atau memenuhi ambisi elite politik yang tidak berdasarkan nilai-nilai politik yang hakiki.

Reformasi yang dilakukan oleh rakyat telah memberikan sisi positif dan negatif bagi perkembangan masyarakat atau pembangunan daerah seperti:

- Demokrasi telah berkembang di masyarakat, tetapi demokrasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai dasar dari masyarakat. Etika dasar demokrasi yang digunakan adalah nilai-nilai dari bangsa lain sehingga masyarakat kita sebagian kehilangan identitas diri. Apa yang mereka lakukan bukan didasarkan nilai, norma dan kaedah lokal, tetapi nilai demokrasi barat yang dipakai. Akibatnya apapun yang dilakukan pemerintah atau masyarakat sendiri adalah "salah", sementara jalan keluarnya tidak ada. Karena demokrasi yang digunakan tidak sesuai dengan pakaian yang kita gunakan, baik ukuran mahupun isinya sangat berbeda sekali dengan nilai dasar masyarakat kita sendiri (nilai dasar kita adalah musyawarah dan mufakat, pemilihan berdasarkan suara terbanyak adalah jalan akhir jika tidak dapat diputuskan. Namun Sang Maha Pencipta memberikan arahan apabila perdebatan tidak mendapat jalan keluarnya maka kembalikan permasalahan itu kepada-Nya).

Demokrasi hari ini yang digunakan adalah konsep dari Barat. Ini yang diadungkan oleh akademisi dan politisi yang setiap hari disajikan oleh pemikiran filosofi seperti Filsuf Pericles, 431 SM. Kemudian diikuti oleh Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero. Konsep demokrasi yang diperkenalkan para filsuf tersebut beberapa ratus tahun tidak laku (tidak digunakan). Konsep ini baru diterima pada abad 17, yaitu masa Renaissance yang dipelopori oleh Machiaveli (1467-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), Montesquie (1689 -1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Kemunculan mereka ini adalah sebagai reaksi atas keotoriteran monarchie dan gereja. Jadi sumber konsep demokrasi Barat adalah para filsuf yang tidak mengakui adanya Allah dan Rasul. Mereka hanya mengandalkan akal fikiran semata. Demokrasi menurut konsep Barat adalah kekuasaan yang berasal dari "rakyat." Jadi konsep demokrasi ini mengibaratkan suara rakyat sebagai suara Tuhan atau rakyat adalah wakil Tuhan. Tentu hal ini membalikan logika akal sehat, dimana rakyat menjadi sumber kekuasaan dan kekuatan, bukan dari segala sumber yang Maha Pencipta. Konsep demokrasi seperti ini memberikan kewenangan kepada rakyat untuk membuat hukum melalui wakilnya. Jadi tidak mengherankan jika pada saat ini semuanya tindakan yang dilakukan pemerintah tidak benar, yang benar adalah rakyat banyak (jika rakyat sebagai sumber daya, tetapi tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman dan tidak berilmu tentang pemerintahan, maka akan menjadi permainan orang yang berilmu atau diperdaya oleh sekelompok orang yang pandai, jika yang pandai tidak berakhlak sesuai dengan keyakinan agama, maka nilai kemanusiaan yang hakiki akan dilanggar, tidak kenal lagi

mana yang halal dan mana yang haram, semuanya rata. Jika keadaan seperti ini berlaku, maka tunggu laknat Tuhan dan kehancuran akan datang/terjadi).

Menurut konsep Islam demokrasi itu bukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi berdasarkan kebenaran, kejujuran, amanah dan fatonah acuan dasarnya adalah syariat. Jika dasarnya suara terbanyak dalam al-Qur'an telah diberitahukan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk berbohong, ingkar janji dan menghalalkan segala cara yang penting tujuan tercapai. Hal ini disampaikan pada Surat Al-A'raf ayat 102, Al-Jaatsiyah ayat 26, Az-Zukhruf ayat 78, Fushshilat ayat 3-4, Al-Mukmin ayat 59 dan 61, Ar-Ruum ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 223, Al-Furqan ayat 50, Al-Anbiyaa ayat 24, dan banyak lagi surat-surat yang menyatakan bahwa suara terbanyak dari manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berdusta, mengingkari janji, dan tidak amanah. Oleh karenanya pengangkatan pemimpin tidak harus berdasarkan suara terbanyak. Tetapi harus berdasarkan akhlak yang melekat pada setiap tindak tanduknya yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis Rasul, serta berpedoman pada nilai-norma dan kaedah yang berlaku pada masyarakat setempat.

Menurut Islam sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an suara kebenaran itu justru dari orang yang sedikit, bukan dari yang banyak. Seperti dalam Surat Al-Haaqqah ayat 40-41, Al-Mulk ayat 23, Al-Mukmin ayat 58, Saba' ayat 13, dan banyak lagi surat-surat yang menyatakan bahwa suara yang terbanyak itu tidak selamanya benar, tetapi suara yang sedikit itu yang membawa kebenaran.

Rasulullah bersabda, "Kami tidak mengangkat orang



yang berambisi untuk duduk dalam jabatan" (HR. Muslin). Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman Bin Samurah, janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung kesengsaraan dan akhirnya azab pada hari kiamat (HR. Ath-Thabrani). Seterusnya Rasulullah bersabda, "Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu, di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka busuk daripada bangkai (HR. Ath-Thabrani).

Dalam Islam diperintahkan bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang menyangkut hajat orang banyak, dan diikuti musyawarah hanya orang-orang yang berilmu dan berkompeten di bidangnya (Asy-Syuura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159).

Berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, inilah seharusnya demokrasi yang diperkenalkan oleh bangsa dan negara kita. Hal ini tentu sesuai dengan Visi dan Misi Riau yang ingin menjadikan Riau sebagai "Pusat Perdagangan, Industri, Jasa dan Budaya Melayu yang Agamis". Inilah konsen demokrasi yang diajarkan oleh agama Islam dan mungkin juga oleh agama-agama lain yang ada di dunia ini.

- Masyarakat diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk menumbuhkan daerahnya sesuai dengan kemampuan sendiri. Alat untuk itu adalah pemerintah pusat telah memberikan desentralisasi. Azas ini akan menumbuhkan otonomi daerah. Artinya daerah dapat melaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri

dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan itu adalah dalam bentuk perkembangan infrastruktur (jalan, kesehatan, pembangunan sekolah dan pembangunan pasar). Implikasi negatif dari pemekaran daerah adalah muncul lokalitas yang taklik dan ego daerah sangat tinggi (semuanya harus dilihat dari putra daerah dan bukan putra daerah). Namun keadaan ini tidak belaku lama, ia akan luntur seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat itu sendiri.

- Pemekaran yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai misi yang mulia, yaitu ingin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kelancaran pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan memberikan dampak yang positif kepada kemajuan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun kedekatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tetap pada jalur yang disepakati. Jangan sampai kedekatan pelayanan menimbulkan implikasi yang negatif seperti biaya bertambah, hal ini tentu memberatkan masyarakat. Jika perlu pelayanannya lancar biaya murah. Ini yang menjadi tujuan utama pemekaran daerah.
- Dampak lain adalah identitas sosial-politik lokal semakin nampak, namun identitas jangan memunculkan perpisahan atau separatis masyarakat untuk meninggalkan tujuan desentralisasi itu sendiri. Identitas yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wujud dari keanekaragaman atau kebhinikaan, yang tertera dalam lambang negara kita.
- Reformasi yang menimbulkan atau melahirkan daerah otonom, akibat kehendak masyarakat untuk memisahkan diri



dari daerah induknya. Juga menimbulkan implikasi yang kurang menggembirakan bagi sebagian masyarakat baik yang ada di daerah induk atau di daerah pemekaran. Hal yang sering timbul akibat pemekaran wilayah atau daerah adalah;

- a) Munculnya sifat kedaerahan yang tidak rasional. Muncul istilah putra daerah atau bukan putra daerah. Konsep ini muncul ketika ada pemilihan kepada daerah atau perwakilan masyarakat, atau ketika pemilihan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, muncul juga dalam pengisian struktur birokrasi. Konsep ini perlu diluruskan, karena kondisi seperti ini tidak memberikan keuntungan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Kelemahan lain dapat dilihat dari dua sisi iaitu; 1) menurunnya maksimal produktivitas. 2) munculnya primordial yang tinggi dan ini merugikan bagi pembinaan bangsa untuk mencapai kesatuan yang hakiki.
  - b) Munculnya atau lahirnya daerah baru kadang-kadang menimbulkan konflik antara masyarakat di daerah induk dengan daerah pemekaran. Hal ini disebabkan kecemburuan sebagian kecil masyarakat yang selama ini kurang diperhatikan oleh masyarakat yang ada di daerah induk.
- Perlu ada peninjauan kembali atas supratruktur yang telah dibuat terutama peraturan yang telah dilahirkan pada masa reformasi seperti pembagian tugas dan fungsi pimpinan daerah dengan pemerintah pusat. Contoh eksistensi Camat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengkoordinir desa. Karena UU yang berlaku tidak secara jelas memberikan tugas dan fungsi kepada camat dalam mengkoordinir pemerintahan desa (UU No. 22 Tahun

1999 dan UU No. 32 Tahun 2004)

- Perlu ada kejelasan hubungan antara pusat dan daerah. Jangan ada peraturan yang mendua.
- Pemekaran wilayah perlu ada penegasan yang jelas terhadap tapal batas antara satu daerah dengan daerah yang lain.

### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Kebijakan desentralisasi yang diikuti dengan keinginan untuk membentuk daerah otonom. Seperti melakukan pemekaran wilayah baik dari tingkatan provinsi hingga pemekaran rukun tetangga (RT). Banyak faktor penyebab masyarakat ingin membentuk atau memekarkan administrasi pemerintahan dari pemerintahan induknya. Seperti alasan ingin memperlancar arus pelayanan, memudahkan masyarakat untuk berurusan baik yang berkaitan dengan keperluan masyarakat umum sampai pada alasan keperluan individu. Semua itu adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat semata bukan hanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang merasa kecewa terhadap sistem pengurusan yang ada di daerah induk pemerintahan.

Kebijakan desentralisasi selain membentuk daerah otonom dan tuntutan masyarakat ingin lepas dari pemerintahan daerah induknya. Mereka juga mengusung isu “demokrasi.” Gagasan yang terakhir ini yang paling kental, sebagai alasan untuk pemekaran administrasi pemerintahan daerah. Menurut faham mereka, sokoguru demokratisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah tidak akan berjalan efektif



jika tidak dilakukan pemekaran, untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan desentralisasi yang memberikan ilham untuk pemekaran wilayah secara administrasi lebih bertujuan untuk memberikan kemampuan anggota masyarakat atau memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam menata dan melaksanakan pemerintahan di daerahnya. Jadi pemekaran wilayah bukan untuk kepentingan elite tapi kepentingan masyarakat. Dalam bentuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat agar kesejahteraan lebih merata, baik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat mahupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Daerah atau wilayah yang baru terbentuk sebagai dampak dari pemekaran wilayah, diharapkan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, akan dapat diwujudkan. Kebijakan publik dijalankan dengan maksud untuk kepentingan masyarakat tanpa memandang strata atau kelompok. Kebijakan daerah atau wilayah baru dapat memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat yang ada selama ini. Pemekaran wilayah sebagai bentuk daerah atau wilayah baru, jangan sampai menambah kesengsaraan masyarakat baik daerah induk maupun daerah baru.

Harapan masyarakat untuk memekarkan wilayah secara administrasi adalah untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Sebab tidak jarang terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun tidak jarang pula pelaksanaan kebijakan dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapan awal yang ditetapkan. Harapan kebijakan

pemekaran wilayah ditujukan untuk memperbaiki keadaan masyarakat baik secara fisik pembangunan daerah ataupun perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini telah dipertanyakan secara teoritik oleh Lester dan Stewart dan Jones apakah pelaksanaan kebijakan publik akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, atau hanya memberikan manfaat segelintir orang saja?

Gagasan dan harapan kebijakan pemekaran wilayah adalah suatu hal yang normal. Karena perubahan masyarakat pasti terjadi, baik secara evolusi ataupun secara revolusi. Oleh itu, tidak mungkin suatu wilayah suatu saat tidak dimekarkan administrasinya? Hal ini sangat berkaitan sekali dengan perkembangan kepentingan dan keperluan masyarakat itu sendiri. Sebelum pelaksanaan pemekaran wilayah terealisasi maka dalam kajian akademi perlu adanyaantisipasi dampak dari pemekaran itu sendiri. Dampak dari pemekaran wilayah itu secara teoritik ada dua, iaitu; ada dampak yang dapat dikontrol dan dikendalikan ada dampak yang tidak dapat dikontrol dan dikendalikan? Pertanyaan yang timbul dalam pemekaran wilayah adalah: 1) apakah pemekaran wilayah boleh meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat? 2) apakah pemekaran wilayah akan menimbulkan persoalan yang lebih krusial lagi? dan 3) mengapa suatu daerah perlu dimekarkan?

Pemekaran wilayah dalam suatu daerah tidak hanya melihat dari sudut ekonomi saja, tetapi lebih luas dari hal tersebut. Apabila pemekaran wilayah hanya melihat salah satu sudut sahaja ini akan menimbulkan konflik baik secara horizontal mahupun vertikal. Selama ini yang mengusulkan pemekaran wilayah adalah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan (daerah induk) yang tidak mendapatkan pemerataan pelayanan publik. Kenyatannya, pertimbangan peme-



karan saat ini bukan menjadi pertimbangan pelayanan publik atau pemerataan pembangunan, akan tetapi lebih pada pertimbangan kepentingan kelompok tertentu atau elite tertentu.

Pemekaran wilayah yang secara teoritik akan memberikan positif dan negatif pada masyarakat. Selain itu juga, pemekaran wilayah lebih mengarahkan kepada keanekaragaman dari suatu komunitas atau daerah. Pertanyaannya adalah, bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari proses pemekaran wilayah? Dan memperbesar dampak positif dari pemekaran wilayah tersebut?

Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan daerah atau wilayah baru telah relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Dari sisi ekonomi, ketertinggalan daerah atau wilayah baru terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung Bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.

### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Berdasarkan pada uraian pada lembaran terdahulu dapat diberikan simpulan bahwa secara teoritik, pemekaran memudahkan pelayanan publik, akan tetapi pada praktiknya pelayanan yang diberikan aparat pemerintah tidak sesuai dengan cita-cita pemekaran yang diinginkan, sumber dana untuk pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat habis terserap untuk dana politik. Sementara pemerintah daerah hasil peme-

karan memerlukan dana besar untuk kepentingan pembangunan. Sementara kabupaten induk tidak memberikan forsi dana yang dijanjikan. Bahkan ada kasus daerah pemekaran baru, pegawainya dua sampai tiga bulan tidak gaji (bergaji) mereka bekerja dengan sukarela demi mewujudkan pemerintahan daerah yang baru, dan menunjukkan kepada kabupaten induk bahwa mereka mamu dan mau bekerja tanpa harus digaji, tidak tergantung belas kasihan kabupaten induk.

Pemekaran daerah tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat ataupun pelayanan publik. Pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke daerah baru, sehingga menjadi tempat pemusatan penduduk miskin. Keadaan ini akan memberikan gambaran bahwa daerah yang baru itu identik dengan kemiskinan. Hal itu suatu pandangan yang salah. Padahal pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sering menjadi argumen utama pemekaran wilayah. Namun, yang terjadi justru pemusatan ketertinggalan secara spasial dan peningkatan ketimpangan antar warga di daerah baru. Contoh berdirinya Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Kota Dumai dan Meranti suatu berkah tersendiri bagi warga masyarakat setempat.

Lihat hari ini Kabupaten Siak tidak ada lagi kecamatan atau desa yang terisolir, semuanya dapat ditembus oleh jalan darat dan jalan air. Pada masa di bawah Kabupaten Bengkalis banyak sekali daerah-daerah yang jauh dari induk kekuasaan seperti negeri yang tidak ada yang mengurus. Kabupaten Rokan Hilir hari ini, semuanya sudah terbuka. Begitu juga dengan Kota Dumai. Kabupaten Meranti yang sudah melepaskan diri dari Kabupaten Bengkalis, mulai berbenah diri. Sebelum pemekaran bahkan awal pemekaran, di Pulau Merbau ada tujuh desa kondisinya sangat memprihatikan, seperti



negeri yang tidak terurus. Kini Pulau tersebut sudah menjadi kecamatan sendiri dan mereka mulai berbenah diri. Kasus di Desa Kepau Baru, daerahnya seperti tidak ada pimpinan yang mengurus, pada awal tahun 2010 mempersiapkan diri untuk menjadi kecamatan sendiri, yang bergabung dengan daerah yang ada disekitarnya. Inilah berkah pemekaran daerah.

Namun demikian, sebagai daerah yang baru dimekarkan, tentu ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang ada suatu kewajaran tetapi perlu dibenahi. Seperti isu pelayanan publik, sebagai instrumen negara bagi *people acces to welfare*, baik instrumen regulatif (perda) maupun instrumen fiskal (APBD) belum menempatkan rakyat sebagai bagian inti dari sistem permainan. Rasionalisasi dan disiplin manajemen masih belum tegak, politik terus juga mendominasi. Kasus pemekaran wilayah, misalnya kerangka dasar pemekaran adalah sebagai tindakan khusus dalam manajemen publik. Bahwa dengan memilih pemekaran diyakini memicu percepatan pembangunan dan pelayanan publik, yang semua itu sulit dicapai kalau pilihannya tidak dilakukan pemekaran. Urgensi dan proyeksi menjadi kata kunci. Aspek urgensi mesti dirunding dan diputuskan secara politik, sedang proyeksi dibuat berdasar rasional yang terukur.

Lemahnya mutu rasionalitas kebijakan, longgarnya disiplin manajemen, terutama di sisi eksekutif yang mestinya mendasarkan tuah atau wibawa daya tawarnya pada kedua modal tersebut, berimplikasi tidak kunjung muncul *grand design* penataan daerah. Semua itu membuka lebar ruang politisasi. Kriteria pemekaran yang berbicara teknokratis serentak luluh dalam proses yang amat politis. Segalanya terasa ambigu. Fenomena kinerja daerah pemekaran yang sebagian besar tidak sesuai makin memperkuat tesis sebelumnya.

Fenomena pemekaran sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Kinerja *instrumental fiscal* tersebut tentu sulit menjadi stimulant alternatif di tengah masih lesunya investasi sektor swasta. Rakyat merasakan mudahnya urusan perijinan, terbantunya biaya layanan dasar, serta terbukanya proses politik dan kinerja birokrasi. Dampak baik otonomi mulai terasakan, tingkat kepercayaan publik tampak menguatkan di daerah-daerah tersebut.

Pada intinya pemekaran daerah yang terjadi diperlukan hal-hal seperti berikut:

- Membangkitkan kreativitas dan inovasi bagi daerah yang kurang sumerdayanya
- Inovasi yang dilakukan tergantung pada kepemimpinan lokal yang dapat menjamin efektivitas dan sustainability, institusionalisasi jelas, yakni pengaturan berbasis peraturan perundang-undangan dan dalam kerangka reformasi birokrasi secara menyeluruh.

### ***Tuan-tuan dan Puan-puan Sidang Senat yang Mulia***

Ukuran kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan desentralisasi, secara umum memang belum dapat dilakukan, tetapi dalam jangka panjang apa yang diharapkan dapat diwujudkan. Dari fakta tersebut di atas, menguatkan otonomi daerah, apalagi pemekaran wilayah agar lebih efektif, filterisasi pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan langsung masyarakat merupakan keharusan. Sebab dari belanja langsung itulah tergambar kegiatan pemerintah daerah hasil pemekaran, memang diperuntukkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan elite atau aparatur



pemerintah daerah itu sendiri, yang selama ini lebih menitik-beratkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Demikianlah ulasan singkat tentang Kebijakan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan.

*Billahitaufik walhidayah*

*Wassalammuailkum Wr. Wb*

**Sujianto**

## RUJUKAN

- Atmodarminto, R. 2000. *Babad Demak, dalam tafsir sosial politik keislaman dan kebangsaan*. Terj. Saudi Berlian, Cetak Pertama, Jakarta: Millennium Publisher.
- Anwar Saleh. 1994. *Eksistensi hutan tanah ulayat di provinsi Riau dan prospeknya di masa depan: Suatu tinjauan, tanah hutan dan pembangunan*, Pekanbaru: Universiti Islam Riau Press.
- Bambang Yodoyono. 2002. *Otonomi daerah: Desentralisasi dan pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bhenyamin Hoessein. 2002. Kebijakan desentralisasi, local government, *Jurnal Administrasi Negara* 2 (2): 1-5.
- BW. Andayana & V. Matherson. 1991. Konsep melayu menurut sumber sejarah. Dlm. Suwardi (pnyt). *Prosiding budaya melayu dalam perjalanannya menuju masa depan 2003*. Cetak Pertama. hlm. 12 – 26. Pekanbaru: Pusat Penelitian Universitas Riau.
- Eaton, W.Y. 1986. *Pembangunan lembaga dan pembangunan nasional dari konsep ke aplikasi*. Terj. Pandam Guritno & Aldi Jeni. Cetak Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia
- Eitzen & Zinn. 2001. "In conflict and order: Understanding society". Dlm. Abdul Halim Hamid. (pnyt.). *Mengenal lembaga sosial*. hlm. 44-56. Sedang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
- Firth, Elements of Social Organization. 1993. *Beberapa teori sosiologi tentang struktur masyarakat*. Jakarta:



Rajawali Grafindo Persada.

Fred Eggan, Evans-Pritchard, E.E. & Radcliffe-Brown, A.R. 1980. *Struktur dan fungsi dalam masyarakat primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gde Putra Agung. 2001. *Pilihan sistem birokrasi dari tradisional ke kolonial*. Cetak Pertama. Yogya: Pustaka Pelajar.

Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, santri dan priyayi dalam masyarakat jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Hans Antlov. 2003. *Negara dalam desa: Patronase kepemimpinan lokal*. Jogjakarta: Lapera Pustaka Utama.

Harton, P.P. & Hunt, C.L. 1986. *Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional.

Haw Widjaja. 2001. *Pemerintahan desa/marga, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Cetak Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harsja, W.B. 1985. *Birokrasi dan kebudayaan*. Cetak pertama. Jakarta: Gramedia.

Khairul Muluk. 2005. *Desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Malang: Bayu Media.

Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*. Cetak Kedua. Yogya: Tiara Wacana.

Kusnaedi. 1995. *Membangun desa pedoman untuk penggerak IDT mahasiswa dan kader pembangunan desa*. Cetak Pertama. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Lauer, H.R. 2001. *Perspektif tentang perubahan sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Li, T.M. 2002. *Proses transformasi daerah pedalaman di Indonesia. Transforming the Indonesian Upland: Marginality, power and production*. Terj. Sumitro & Kartikasari, SN. Ed. Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Melville, J. & Herskovits, M. 1994. *Pokok-pokok antropologi budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Miftah Thoha. 2002. *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazaruddin Syamsuddin. 1991. *Budaya politik dan birokrasi lokal*. Jakarta: Grafiti.
- Pemerintah Daerah Propinsi Riau. 1994. *Sejarah Kesultanan Inderagiri*. Pekanbaru.
- Pemerintah Daerah Propinsi Riau. 1995. *Sejarah Kerajaan Pelalawan*. Pekanbaru.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau. 1986. *Masyarakat melayu Riau dan kebudayaan*. Pekanbaru.
- Parsons, Talcott & Edward A.S. (pnyt.). 1951. *Toward general theory of action*. New York: Harper and Row.
- Riggs, F.W. 1991. Budaya birokrasi di Indonesia. Dlm. Alfian & Nazaruddin Syamsuddin (pnyt.). *Profil budaya politik Indonesia*. hlm. 223-231. Jakarta: Grafiti.
- Robert MacIver & Charles H.P. 1983. *Islam dan perubahan sosiobudaya: Kajian Islam tentang perubahan masyarakat*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.



- Rochim Wirjomidjojo, S. 1987. *Menciptakan struktur pedesaan progresif*. Jakarta: Yasaguna.
- Radcliffe-Brown. 1993. *Beberapa teori sosiologi tentang struktur masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadu Wasistiono dkk, 2002, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Pusat kajian Pemerintahan STPDN, Citra Pindo.
- Said Saile, 2009. *Pemekaran Wilayah sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*, Restu Agung Jakarta.
- Sujianto, dkk. 1996. Pengembangan masyarakat terasing guna penyusunan perencanaan pengembangan purna masyarakat terasing di desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir. Dlm. Proyek Penunjang IDP-IDT - OECF Se- Propinsi Riau. *Pengembangan masyarakat terasing guna penyusunan perencanaan pengembangan purna masyarakat terasing di Riau*. hlm. 1- 42. Pekanbaru: Bappeda TK. I. Riau – LPM-UNRI,
- Sujianto, dkk. 1997. Pengkajian pemberdayaan fungsi lembaga pedesaan sebagai penunjang pelaksanaan otonomi daerah (Studi Pemberdayaan Lembaga ketahanan Masyarakat Desa dan Lembaga Musyawarah Desa di Propinsi Riau). Pekanbaru: Bappeda TK. I Riau – P2BKM-UNRI.
- Sujianto, dkk. 1998. Penelitian social development strategi pengembangan komunitas marjinal (Orang Terasing) Kawasan Pesisir Kabupaten Bengkalis. Proyek Penelitian Masyarakat Terasing di Kawasan Pesisir Kabupaten Bengkalis. Tahun anggaran 1997/1998. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis

## – P2BKM-UNRI.

- Sujiyanto, dkk. 1999. *Preservasi masyarakat dan budaya sakai Desa Sebangar Kecamatan Mandau*. Pekanbaru: Jaringan Kerja Kebudayaan Melayu – P2BKM UNRI.
- Sujiyanto, dkk. 2000. *Strategi pengembangan ekonomi masyarakat marginal di Indragiri Hilir (Studi implementasi kebijakan publik kabupaten Indragiri Hilir)*. Pekanbaru: Proyek Universitas Riau – LPM-UNRI.
- Sujiyanto, dkk. 2001. *Profil kampung-kampung melayu Bantaran Sungai Siak*. Proyek Pengembangan Masyarakat Melayu di Bantaran Sungai Siak. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Propinsi – P2BKM-UNRI.
- Sujiyanto & Surya Maulana. 2002. *Kelembagaan masyarakat pesisir dan kepulauan: tinjauan budaya untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan*. Pekanbaru: Coremap dan Critic.
- Sujiyanto. 2003. *Budaya tradisional Bengkalis*, Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kerjasama dengan Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu Universitas Riau.
- Sunyoto Usman. 1991. Kepemimpinan dan struktur kekuasaan di pedesaan dalam pembangunan. *Majalah Prospektif* 3 (3): 33-45.
- Suwarno, P.J. 1989. *Sejarah birokrasi pemerintahan Indonesia dahulu dan sekarang*. Ed. Pertama, Cetak Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tem Work Lopera. 2001. *Politik pemberdayaan: Jalan mewujudkan otonomi daerah*. Cetak Pertama. Yogyakarta: Loppera.



- Timur Mahardika. 2001. *Strategi tiga kaki: Dari pintu otonomi daerah mencapai keadilan sosial*. Cetak Pertama. Yogyakarta: Lappera.
- Thorick Gunara, 2009, *Komunikasi Rasulullah, Indahnya Berkomunikasi ala Rasulullah*, Refika Bandung.
- Toynbee, A. 1961. *A study of history*. New York: Oxford University.
- Tunrner, S.B. 2000. *Teori-teori sosiologi modernitas posmodernits*. Terj. Imam Baehaqi dan Ahmad Baidowi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uphoff, Norman. 1986. *Local institutional development: An analytical sourcebook with cases*. New York: Kumaran Press.
- Wan Azmi Ramli. 1992. *Pembangunan masyarakat dari perspektif kebajikan*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributor Sdn, Bhd.
- Weber. 1989. *Bureaucracy*. Terj. M. Rusli Karim & Totok Daryanto. Jogyakarta: Tiara Wacana.
- Weber. 1990. *Bureaucracy in modern society*. Terj. Slamet Rijanto. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- William Hampton. 1990. *Local government and urban polities*, London and New York: Longman.
- Yayuk Yuliati, dkk. 2003. *Sosiologi pedesaan*. Malang: Lappera Pustaka Utama

# CURRICULUM VITAE

## I. Identitas Diri

1. Nama : Sujianto
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan/26 September 1962
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Staf Pengajar Fisipol-UNRI
5. Agama : Islam
6. Status : Menikah
7. Alamat : 1) **Rumah**, Perumahan Mutiara  
Permai Blok C. No. 72, RT. 03/  
RW.04, Jalan Swakarya Tuah  
Karya-Pekanbaru  
2) **Kantor, Fisip Kampus Bina  
Widya** KM. 12.5 Jln. HR  
Soebrantas Pekanbaru  
Hp. 0811-764892.  
3) Kantor Kampus Lama Fisip  
Jln. Pattimura No. 9 Pekanbaru
8. Hobby/Kegemaran : Membaca
9. Anak yang ke : 4 dari 4 bersaudara
9. Orang Tua
  - 1) Ayah : Kasiran (Almarhum)
  - 2) Ibu : Umi Salamah (Almarhumah)

## II. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun Lulus	Tempat	PRESTASI
1	Sekolah Dasar Negeri No. 6	'70-'76	Tembilahan – Riau	Juara Umum
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 1	'77-'80	Tembilahan-Riau	Juara Umum
3	Sekolah Menengah Atas Negeri no. 1	'80-'83	Tembilahan-Riau	Juara Umum
4	Strata I Adm. Niaga Fisip UNRI	'83-'88	Pekanbaru-Riau	Pemuncak I Fisip
5	Magister Publik Administrasi-UGM	'93-'95	UGM Yogyakarta DIY	Selasai 20 bulan
6	Doktor Phalsafah (Ph.D) Implementasi Lembaga Lokal di Riau: Studi Kasus.	Juli 2003 s/d Januari 2008	UKM, Bangi, Selangor, Mlsia	4 (empat) tahun 6 bulan

## III. Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun	Tempat
1	Ketua Osis/ SMP	1978 -1980	SMPN. 1 Tembilahan
2	Ketua Osis/ SMA	1981 -1983	SMAN. I Tembilahan
3	Ketua III BPM	1985 -1987	Fisip UNRI Pekanbaru
4	Pengurus Satgas AMPI	1985 – 1988	Pekanbaru
5	Pengurus HKTI	1988 – 1990	Peknabru
6	Ketua Umum HIPPMIH	1988 - 1990	Pekanbaru
7	Dewan Pembina HIPPMIH	2009 - sekarang	Pekanbaru
8	Anggota Asosiasi Dosen Indonesia	2008 - Sekarang	Pekanbaru

## IV. Riwayat Pekerjaan

No	Pekerjaan	Tahun	Tempat
1	Asisten Dosen Fisip UNRI	1989 - 1990	Fisip UNRI
2	Dosen Fisip UNRI	1990 - sekarang	Fisip UNRI
3	Dosen Luar Biasa	1989 - 1993	FIA UNILAK PEKABNBARU
4	Dosen Luar Biasa	1990 - 1993	Fisip UIR Pekanbaru
5	Dosen Luar biasa	1996 - 2000	Fisip UIR Pekanbaru
6	Dosen PSIA	2000 - sekarang	PPs - UNIR
7	Pengajar STIA Dumai	2002 - sekarang	STIA Lancang Kuning Dumai
8	Dosen Luar biasa	2007 - sekarang	F.Psychologi UIR Pekanbaru
9	Dewan Penyunting Jurnal JIANA	2000 – sekarang	PPs -UNRI

10	Pendiri STIE TBH	1996 - 1997	STIE Tembilahan
11	Staf Ahli LPM	1996 - 1998	Universitas Riau
12	Sekretaris P2BKM UNRI	1996 - 2004	Universitas Riau
13	Konsultan Amithas Ekspert	1998 - 2001	Jakarta
14	Konsultan Kehutanan Prov. Riau	1998 - 2002	Riau
15	Konsultan CPI. Cornunnity Development Masyarakat Suku Sakai	1999 - 2003	Riau
16	Penggagasan dan pengurusi Sayang-sayang Selat Tasik Tenggara	2000 - 2005	Riau
17	Tim Pendiri PSIA PPs UNRI	2000 - 2003	Pekanbaru
18	Tim Pendidik Program Pariwisata- Fisip Unri	2002 - 2008	Pekanbaru

## V. Penelitian-penelitian

No	Judul	Lokasi	Tahun
1	Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.(Skripsi Strata satu)	Pulau Palas, Tembilahan Riau	1988
2	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di desa-desa Persiapan PIR-SUS Sei. Tapung, Tandun	Sei. Tapung, Tandun.	1989
3	Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Terhadap Aktivitas Kerja perangkat desa	Desa Kamar, Kamar	1990
4	Pelaksanaan Anggaran Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Desa.	Kecamatan Tembilahan	1991
5	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi desa.	Kec. Bangkinang dan Kamar.	1991
6	Pembinaan Upaya Penggalan Kekayaan Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa	Rimbo Panjang, Tambang.	1992
7	Penyusunan Anggaran keuangan dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa.	Kecamatan Tembilahan.	1992
8	Kontribusi Tenaga Kerja Wanita terhadap Pendapatan Keluarga	Kulim, Bukit Raya	1993
9	Mobilitas Tenaga Kerja Wanita dan pengaruhnya Terhadap Prestasi Anak	Kulim, Bukit Raya	1993



10	Implementasi Proyek Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi (P3DT) (Thesis Magister Publik Administrasi).	Guntung III, Kateman, Riau	1995
11	Kaji Tindak Pembinaan Masyarakat Duano/Suku Laut-Indragiri Hilir.	Kab. Indragiri Hilir.	1996
12	Pengembangan Kawasan Pemukiman Purna Masyarakat Terasing.	Kec. Kuala Indragiri – INHIL	1996
13	Pengkajian Pemberdayaan Fungsi Lembaga Pedesaan sebagai Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah)	Propinsi Riau,	1997
14	Teknik Kelembagaan Pembangunan Hutan Rakyat di lahan Gambut.	Lubuk Sakat	1997
15	Sosial Development Strategi Pengembangan Komunitas Marjinal Kawasan Pesisir .	Kab. Bengkalis	1998
16	Profil Kampung melayu di Bantaran Sungai Siak.	Kab. Siak	1998
17	Responsiveness Birokrasi: Perspektif Birokrasi Lokal dalam Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Kab. Bengkalis	1998
18	Kebangkitan Keterampilan Sakai (Tantangan dan Harapan)	Sebangar, Duri	1999
19	Pemetaan Masyarakat Suku Sakai Kec. Mandau, Minas.	Kab. Bengkalis	1999
20	Penyusunan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)	Kab. Siak	1999
21	Preservasi Masyarakat dan Budaya Sakai	Sebangar, Mandau	1999
22	Pendataan Penyusunan Perencanaan peningkatan Kesejahteraan Guru Sekolah Dasar di Daerah Terpencil.	Propinsi Riau	2000
23	Srudi kelayakan dan Identifikasi Usaha Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Pola Perusahaan Pertanian	Kab. Siak	2000
24	Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Marginal.	Indragiri Hilir	2000
25	Asas Transparasi Dalam kebijakan Publik Pembangunan Kab. Bengkalis Pasca Pemekaran.	Kab. Bengkalis	2001
26	Penyusunan Program Pendampingan Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani-Nelayan.	Kab. Siak	2001
27	Pembangunan Kelembagaan Petani Hutan Kemasyarakatan	Kab. Kampar	2001
28	Pemetaan Strategi Pengembangan Masyarakat Pesisir Bareleng	Kota Batam	2001
29	Studi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Nelayan Kepulauan dan Pesisir	Kab. Kepulauan Riau	2002
30	Kajian Kebutuhan Sumber daya Manusia	Kota Dumai	2002

31	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga kerja SDM Prov. Riau	PemProv. Riau	2003
32	Inventarisasi dan Pengembangan Akar Budaya Masyarakat Tempatan Kota Dumai	Pemko Dumai	2003
33	Perencanaan Penataan Seni Budaya Kota Dumai	Pemko Dumai	2004
34	Pola Pembinaan dan Pengembangan dalam menentukan indikator Pembangunan Bidang Pendidikan pada SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Riau	Pemprov.	2004
35	Penyusunan Program Pembinaan dan Pengembangan Komunitas Tradisional (Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar Kab. Pelalawan)	Pemda Kab. Pelalawan	2005
36	Penyusunan Indikator Mutu Pendidikan pada SMU dan Kejuruan Guna mempercepat Peningkatan SDM di Riau	Pemrov.	2005
37	Penyusunan Pola Pembinaan Pendidikan Formal dan Informal Masyarakat Marginal di Provinsi Riau	Pemprov.	2006
38	Pilot Proyek Penelitian dan Pembinaan Sosial Budaya Komunitas Tradisional di Kab. Pelalawan	Pemkab. Pelalawan	2006
39	Penyusunan Model Peningkatan Keterampilan tenaga kerja berorientasi Pasar Kerja Prov. Riau	Pemprov. Riau	2007
40	Kajian/Studi Evaluasi prog. Kemiskinan Perkotaan Kabupaten pelalawan	Pemkab. Pelalawan	2007
41	Pelaksanaan Lembaga Lokal di Riau : satu kajian Kes	Disertasi	2008
42	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Daerah Perbatasan antara Kab. Pelalawan dengan Kab. Indragiri Hilir	Bappeda Provinsi Riau	2008
43	Kajian Pengembangan Penguatan Lembaga Lokal di Kota Dumai.	Bappeko Kota Dumai	2008
44	Studi/ Pilot Proyek Pengembangan Modal Sosial (Social Capital) Penanggulangan Daerah Tertinggal Kab. Pelalawan.	Bappeda Kab. Pelalawan	2008
45	Studi Konsep Sosial Budaya Masyarakat dalam Konteks Budaya Kemiskinan Masyarakat Perkotaan di Kota Dumai	Bappeko Dumai	2009



## VI. Karya Ilmiah

No	Judul	Tahun	Keterangan
1	Korupsi dan Prospektif Birokrasi Indonesia	1993	Di Lingkungan UNRI
2	Desentralisasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Derah Riau.	1993	Di Lingkungan UNRI
3	Pembangunan Kawasan Industri dan Pariwisata Batam: Pemerataan Versus Ketimpangan Penerimaan Tenaga Kerja (Suatu Tinjauan Analisa Kebijakan Publik)	1994	Tugas di Lingkungan UGM-Yogyakarta
4	Hubungan Pusat Daerah : Pelaksanaan Otonomi Dalam pemilihan kepala Daerah (kasus Daerah Tingkat I Riau. Tinjauan Birokrasi)	1994	S D A
5	Menguak Budaya Politik di Bumi Lancang Kuning (Suatu Tinjauan Politik)	1994	S D A
6	Metode Analisis Kuantitatif Administrasi Negara (Metode Pengambilan keputusan Kebijakan Publik Dengan Menggunakan Statistik)	1997	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNRI
7	Bisnis dan Birokrasi (Dilema Pelaku Bisnis di Riau)	1997	Riau Pos, 1997
8	Komunitas Orang Duanu: Lautan Tongkah-Kerlip Obor di Aras Pantai	1997	Jurnal Kebudayaan "dawat" , 7-1997.
9	Ketika INHIL Menanti Putra Bumi.	1998	Riau Pos, 1997
10	Uji Statistik Untuk Menganalisis Hubungan dan pengaruh Bivariat dan Multivariat	1998	Diskusi Jurusan ADM. Negara
11	Pergeseran Struktur Ekonomi Orang Sakai (Sebuah Refleksi)	1999	Mesyuarat Pemenuha IV di Akademi Pengajian Brunai UBD 23-27 Juli 1999.
12	Sisakan Tanahku Untuk Anak Cucu (Kembalikan Hak Tanah Pada Hukum Adat Setempat)	1999	Jurnal Kebudayaan "Kesumbo".
13	Sakai atau Menyakaikan Diri	2000	Jurnal Kebudayaan "Kesumbo".
14	Reformasi Administrasi dan Otonomi Daerah	2002	Majalah DPRD "Dewan".
15	Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (Tinjaun Budaya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan)	2002	Coremap : Coral Reef's Information and Training Center (CRITC).
16	Administrasi pembangunan Ditinjau dari Perspektif Budaya dan Ekonomi	2002	Untuk Lingkungan Sendiri (PPs-UNRI)
17	Budaya Tradisional Bengkalis	2003	P2BKM-UNRI dan Pemda Bengkalis
18	Lembaga Komunitas Lokal (Kasus Masyarakat Marginal)	2003	Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan
19	Perekembangan Teori: Pemerintahan Lembaga Lokal dan Perubahan Sosial	2007	Jurnal JIP Fisip UNRI
20	Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik (edisi Kedua)	Nov. 2008	Unri Press dan PSIA PPs UNRI

20	Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik (edisi Kedua)	Nov. 2008	Unri Press dan PSIA PPs UNRI
21	Pengembangan Penguatan Lembaga Lokal	Des. 2008	Alaf Riau
22	Pengembangan Modal Sosial Untuk Daerah Tertinggal	Feb. 2008	UNRI Press dan PSIA PPs UNRI
23	Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri	Feb. 2009	Alaf Riau dan PSIA PPs UNRI
24	Kebijakan Pembebasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan: Suatu Tinjauan Budaya Lokal (Kasus Kota Dumai)	Oktober 2009	Alaf Riau dan PSIA PPs UNRI
25	Kelembagaan : Konsep dan Realitas	Januari 2010	Alaf Riau dan PSIA PPs UNRI
26	Pemekaran untuk Kesejahteraan	Mei 2010	Alaf Riau dan PSIA PPs UNRI
27	Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan	Mei 2010	Alaf Riau dan PSIA PPs UNRI
28	Pemberdayaan dan Kemiskinan	Mei 2010	Alaf Riau dan PSIA PPs UNRI

